



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENGUATAN KERJA SAMA INDONESIA-NORWEGIA TERKAIT ENERGI TERBARUKAN

Luthfia Husnun Ahira

Analisis Kebijakan Ahli Pertama

luthfia.ahira@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kunjungan resmi Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, ke Norwegia menandai penguatan hubungan bilateral Indonesia-Norwegia. Momentum diplomatik ini sekaligus memperingati 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara. Dalam pertemuan bilateral di Oslo pada 2 Desember 2025, Menlu Sugiono dan Menlu Norwegia Y.M. Espen Barth Eide membahas potensi besar kerja sama di bidang energi bersih. Menlu Sugiono menegaskan potensi penguatan kerja sama di bidang energi terbarukan dan inisiatif transisi energi yang konkret. Penguatan kerja sama ini termasuk penawaran teknis dan investasi dari pihak Norwegia untuk mendukung target energi bersih Indonesia.

Salah satu aspek yang mendapatkan sorotan adalah rencana pengadaan panel surya untuk program “80.000 Koperasi Desa Merah Putih”. Pengadaan panel ini diarahkan untuk mempercepat elektrifikasi berbasis energi terbarukan di tingkat desa dan memperkuat ekonomi lokal melalui skema koperasi. Inisiatif ini dapat berfungsi ganda untuk menambah kapasitas pembangkit yang belum merata di daerah, sekaligus mendukung pemberdayaan koperasi desa dalam rantai nilai energi terbarukan.

Selain itu, pembicaraan kedua Menlu juga difokuskan pada pengembangan budidaya ikan dan pertanian berkelanjutan. Program ini diusulkan sebagai strategi ketahanan pangan yang dikaitkan langsung untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depannya, budidaya perikanan dan pertanian berkelanjutan ini memberikan peluang bagi peningkatan produktivitas pangan yang lebih rendah emisi dan lebih tahan iklim.

Pada konteks lebih luas, kerja sama ini juga menyinggung mekanisme pembiayaan iklim dan pasar karbon. Pada November 2025 Indonesia dan Norwegia telah meluncurkan inisiatif perdagangan karbon berbasis teknologi yang signifikan. Kerja sama ini membuka ruang bagi pembiayaan proyek energi baru terbarukan (EBT) melalui kredit karbon, yaitu sertifikat atau izin untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industri. Mekanisme tersebut diharapkan dapat mempercepat investasi dan pengembangan proyek energi hijau berskala besar di Indonesia.

Namun, implementasi rencana-rencana tersebut menghadapi sejumlah tantangan, *pertama* kebutuhan regulasi yang jelas untuk integrasi proyek EBT dan pasar karbon. *Kedua*, kesiapan infrastruktur distribusi listrik di wilayah pedesaan yang belum merata. *Ketiga*, pelaksanaan proyek perlu memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, termasuk potensi dampak terhadap lokasi pembangunan dan tata guna lahan di wilayah yang terdampak, dan yang *terakhir* mekanisme pengawasan dan verifikasi hasil (MRV) untuk kredit karbon harus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Tanpa kebijakan pendukung dan kerangka pengawasan yang kuat, kesempatan investasi ini berisiko tertunda atau manfaatnya tidak berpihak pada komunitas target.

Secara strategis, kerja sama Indonesia dan Norwegia di bidang energi terbarukan berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional, mendukung target pengurangan emisi, serta meningkatkan kapasitas teknologi dan investasi hijau. Namun, keberhasilan implementasi kerja sama ini masih harus memperhatikan sinergi kebijakan domestik mulai dari regulasi, model pembiayaan, hingga keterlibatan masyarakat lokal.

Atensi DPR

Dalam upaya meningkatkan kemitraan energi terbarukan antara Indonesia dan Norwegia, Komisi I DPR RI perlu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan luar negeri. Fungsi ini untuk memastikan bahwa setiap komitmen bilateral yang dibangun pemerintah sejalan dengan kepentingan strategis Indonesia di bidang energi dan diplomasi perubahan iklim. Dalam pelaksanaannya, Komisi I dapat meminta penjelasan dari kementerian terkait mengenai arah kerja sama, mekanisme pembiayaan, dan bentuk dukungan teknis yang disepakati, sekaligus menilai kesiapan regulasi serta implikasinya bagi kepentingan nasional. Lebih lanjut, Komisi I DPR RI penting untuk memastikan bahwa kerja sama yang dijalankan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret dan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Melalui fungsi pengawasan hubungan luar negeri, DPR RI dapat mengawal agar kemitraan internasional pada sektor energi terbarukan ini berkontribusi pada peningkatan ketahanan energi, pencapaian target transisi energi, dan penguatan

Sumber

antaranews.com, 3 Desember 2025;
kemlu.go.id, 3 Desember 2025;
metrotvnews.com, 3 Desember 2025; dan
rri.co.id, 3 Desember 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra R. Oktaviano
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*